

**EVALUASI PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TERHADAP AKUNTANSI PERSEDIAAN DAN ASET TETAP
STUDI KASUS PADA POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

TESIS

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister*

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK



Oleh :

SYAFA'ATUL LAILIYAH
NPM: 0662020020

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
SURABAYA
2009**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis saya ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, saya bersedia tesis ini dibatalkan, dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Magister) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Surabaya, 10 Januari 2009

Syafa'atul Lailiyah

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmatNya peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan judul **"Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntansi Persediaan dan Aset Tetap Studi Kasus Pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya"** untuk memenuhi sebagian persyaratan tugas akhir, guna mencapai derajat Sarjana S-2 pada Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur di Surabaya.

Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dr. M. Nasih, MT. Ak., selaku dosen pembimbing utama, dan Dra. Ec. Diah Hari Suryaningrum, Msi. Ak., selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan dukungan, masukan, dan saran selama proses penelitian tesis ini. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
2. Dr. Ir. Zainal Abidin, MS., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
3. Dr. Indrawati Yuhertiana, MM. Ak., selaku Ketua Program Magister Akuntansi (Sektor Publik) Universitas Pembangunan Nasional

"Veteran" Jawa Timur;

4. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan staf, yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama proses perkuliahan hingga selesai;
5. Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya beserta staf yang telah banyak memberikan dukungan, terutama dalam pengumpulan data dan informasi;
6. Penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada orangtua yaitu Bapak dan Ibu atas doanya, serta suami dan ananda tersayang atas pengertian dan dukungannya.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Peneliti berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang memerlukan.

Surabaya, 10 Januari 2009

Peneliti,

Syafa'atul Lailiyah

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Pembahasan.....	9
 BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Telaah Pustaka.....	17
2.2.1 Akuntansi Sektor Publik	17
2.2.2 Standar dan Sistem Akuntansi.....	17
2.2.3 Sistem Pencatatan	20
2.2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 Tahun 2005).....	21

2.2.4.1. Gambaran Umum SAP	21
2.2.4.2. Pernyataan SAP No. 05.....	24
2.2.4.3. Pernyataan SAP No. 07.....	26
2.2.4.4. Basis Akuntansi.....	31
2.2.4.5. Penyusunan Neraca Awal Pemerintah...	34
2.2.4.6. Jurnal Mencatat Saldo Awal.....	39
2.2.5 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.....	40
2.2.5.1. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	41
2.2.5.2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)	44
2.2.5.3. Sistem Akuntansi Keuangan	47
2.3. Alur Pikir Penelitian.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian Kualitatif.....	50
3.2. Lokasi Penelitian.....	51
3.3. Nara Sumber	52
3.4. Instrumen Penelitian.....	52
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.6. Desain Penelitian	56
3.7. Teknik Analisis Data.....	62
3.8. Kualitas Desain Penelitian.....	65

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	68
4.2. Organisasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	70
4.3. Tugas dan Fungsi	74
4.3.1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)	74
4.3.2. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	76
4.4. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi	78
4.4.1. Akuntansi Barang Milik Negara Pada Unit Akuntansi BMN	79
4.4.1.1. Akuntansi Persediaan Pada Unit Akuntansi BMN	79
4.4.1.2. Akuntansi Aset Tetap Pada Unit Akuntansi BMN	86
4.4.2. Akuntansi Barang Milik Negara Pada Unit Akuntansi Keuangan	92
4.4.2.1. Akuntansi Persediaan Pada Unit Akuntansi Keuangan	92
4.4.2.2. Akuntansi Aset Tetap pada Unit Akuntansi Keuangan	92

4.5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	94
4.5.1. Penilaian Persediaan dan Aset Tetap Pada Neraca Awal	96
4.5.2. Pengakuan Persediaan dan Aset Tetap	100
4.5.3. Pengukuran Persediaan dan Aset Tetap	101
4.5.4. Pengungkapan Persediaan dan Aset Tetap	102
4.5.5. Penyajian Aset Tetap	104
4.6. Hasil Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	110
5.2. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)	41
Gambar 2.2 : Kerangka Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	42
Gambar 2.3 : Diagram Alur Pikir Penelitian	49
Gambar 3.1 : Komponen Analisis Data (<i>Interactive Model</i>).....	63
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tingkat UAKPB (Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 59/PMK.06/2005)	72
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Tingkat UAKPA (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER- 24//PB/2006)	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Organisasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Menurut Hirarki	70
Tabel 4.2 : Informan Penelitian	71
Tabel 4.3 : Rekonsiliasi Aset Tetap Antara Laporan BMN dengan Neraca Per 31 Desember 2007	90
Tabel 4.4 : Mutasi Aset Tetap Sejak 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2007	94
Tabel 4.5 : Daftar Aset Tetap	96
Tabel 4.6 : Neraca Awal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Per 31 Desember 2005	97
Tabel 4.7 Format Penyajian Aset Tetap di Neraca Per 31 Desember 2007 dan Format menurut SAP	105

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : *Mapping* Penelitian Terdahulu Tentang Pengelolaan
Persediaan dan Aset Tetap serta Implementasi SAP
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Penelitian, Proposisi, dan Kriteria
Untuk Menginterpretasikan Temuan
- Lampiran 3 : Format Buku Persediaan
- Lampiran 4 : Format Laporan Persediaan
- Lampiran 5 : Format Inventarisasi Persediaan
- Lampiran 6 : Neraca Per 31 Desember 2005
- Lampiran 7 : Neraca Per 31 Desember 2006
- Lampiran 8 : Neraca Per 31 Desember 2007

Syafa'atul Lailiyah, 0662020020. EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP AKUNTANSI PERSEDIAAN DAN ASET TETAP STUDI KASUS PADA POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA. Pembimbing utama : Dr. M. Nasih, MT. Ak., dan Pembimbing pendamping : Dra. Ec. Diah Hari Suryaningrum, Msi. Ak.

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis penerapan Sistem Akuntansi Instansi dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 Tahun 2005) di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara membandingkan Sistem Akuntansi Instansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan praktek akuntansi persediaan dan aset tetap.

Hasil penelitian terhadap akuntansi persediaan menemukan bahwa persediaan belum dicatat dalam Buku Persediaan, dan belum membuat Laporan Persediaan berdasarkan hasil inventarisasi untuk disajikan di neraca, hal ini disebabkan keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas persediaan serta kepala satuan kerja sebagai penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang tidak memantau dan mengevaluasi hasil kerja petugas persediaan, sehingga pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan di neraca belum mengacu pada SAP.

Hasil penelitian terhadap akuntansi aset tetap menemukan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan SAP, sedangkan penyajian aset tetap belum berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya, karena Menteri Keuangan belum menetapkan kebijakan akuntansi penyusutan.

Saran dalam penerapan SAI dan SAP atas persediaan dan aset tetap : (1) Memantau dan mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana; (2) Melakukan prosedur verifikasi *output* pelaporan untuk memastikan seluruh transaksi sudah diproses sesuai dokumen sumbernya; (3) Mencatat persediaan dan menyusun laporan persediaan setiap semester berdasarkan hasil inventarisasi.

Kata kunci: sistem akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan, persediaan, aset tetap, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan neraca.

Syafa'atul Lailiyah, 0662020020. *EVALUATING THE IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE ACCOUNTING STANDARD OF INVENTORY AND FIXED ASSET CASE STUDY AT POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA*. Prime supervisor : Dr. M. Nasih, MT. Ak., and assistant supervisor : Dra. Ec. Diah Hari Suryaningrum, Msi. Ak.

SUMMARY

This research purpose is to examine, prove, and analyze the implementation of Institution Accounting System and the implementation of Governance Accounting Standard (PP 24 Tahun 2005) at Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

This research used the descriptive qualitative approach, by comparing Institution Accounting System and Governance Accounting Standard with the practice of inventory accounting and fixed asset accounting.

The research found that in inventory accounting, the inventory has not been registered in an inventory book, there is no inventory report based on inventorytaking, this is caused by the limitation of clerk and the ability of inventory clerk, also the officer who is responsible to examine that the result doesn't evaluate the clerk report, as a result recognition, measurement, and disclosure of inventory on balance sheet doesn't base on Governance Accounting Standard.

The result of fixed asset found that recognition, measurement, and disclosure has been reversed to Governance Accounting Standard, but the value of fixed asset in balance sheet doesn't calculate accumulated depreciation, because the Ministry of Finance has not made any policy of accounting depreciation.

Some advises for the implementation of Institution Accounting System and implementation of Governance Accounting Standard for inventory and fixed asset : (1) Controlling and evaluating the result of clerk activity; (2) Doing verification procedure of output report to make sure that all transaction have been processed according to document resources; (3) Making inventory record and also the inventory report each semester base on inventorytaking.

Keywords: institution accounting system, governance accounting standard, inventory, fixed asset, recognition, measurement, disclosure, presentation, and balance sheet.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta terselenggaranya *good governance* adalah dengan mewajibkan pemerintah pusat yaitu presiden untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, seperti yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan menteri atau pimpinan lembaga untuk menyusun laporan keuangan dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, kemudian Menteri Keuangan akan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, kemudian menyampaikan kepada Presiden dalam waktu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Standar akuntansi merupakan aturan utama yang harus diacu dalam penyajian laporan keuangan dalam kerangka prinsip akuntansi berlaku umum. Standar tersebut penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan.

Sistem akuntansi keuangan diperlukan untuk menghasilkan informasi kepada pihak luar sesuai dengan standar akuntansi. Sistem tersebut disusun untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan transaksi (kejadian ekonomis). Standar dan sistem akuntansi dibangun sebagai upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pasal 32 ayat (1) menyebutkan dengan jelas bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan arti penting Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005. KSAP telah berhasil menyusun draf kerangka konseptual dan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP Nomor 24 Tahun 2005.

UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 7 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk :

Ayat 2 (m) : mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;

Ayat 2 (o) : menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

negara.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yaitu suatu sistem yang terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengumpulan data, pembukuan, serta pelaporan semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas seluruh entitas pemerintah pusat.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari dua sistem utama, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan, dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga non departemen.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2006 yaitu laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN masih mendapat predikat *disclaimer opinion*, hal tersebut diantaranya karena pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) di kementerian negara/lembaga secara umum belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga penyajian persediaan dan aset tetap dalam LKPP belum menggambarkan nilai yang sebenarnya.

Menurut laporan hasil audit BPK atas persediaan dan aset tetap (LKPP *audited* tahun 2006) adalah sebagai berikut :

Hasil audit BPK atas persediaan menunjukkan bahwa terdapat sebelas kementerian negara/lembaga yang belum atau kurang melaporkan

persediaan karena satuan kerja terkait tidak melakukan inventarisasi fisik, sehubungan dengan ketiadaan data tersebut BPK tidak dapat memastikan kewajaran nilai persediaan.

Terdapat lima masalah krusial terhadap pelaksanaan SABMN atas aset tetap yaitu :

1. Belum dilakukan inventarisasi ulang atas seluruh aset kementerian negara/lembaga maupun unit-unit lain yang belum terdaftar;
2. Belum dilakukan revaluasi atas aset tetap secara keseluruhan yang dapat menggambarkan nilai yang wajar;
3. Belum adanya penataan organisasi yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaporan aset tetap;
4. Belum adanya perbaikan sistem dan prosedur penatausahaan barang milik negara; dan
5. Tidak dicatatnya aset tetap yang diperoleh dari dana dekonsentrasi keuangan.

SABMN yang berjalan secara efektif serta inventarisasi dan revaluasi yang dilakukan secara menyeluruh akan berpengaruh secara material pada nilai aset tetap.

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang berada pada tingkat satuan kerja yang selanjutnya disebut UAKPA dan UAKPB, yang merupakan bagian dari unit akuntansi kementerian negara/lembaga.

Masalah yang dihadapi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya adalah belum sepenuhnya menerapkan SAP (PP 24 Tahun 2005) dan SAI, yaitu :

1. Belum pernah melakukan inventarisasi fisik persediaan. Persediaan yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2007 tidak berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
2. Belum dilakukan penyusutan aset tetap per 31 Desember 2007.
3. Sistem Akuntansi Instansi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu :
 - Persediaan belum dibukukan ke dalam Buku Persediaan dalam bentuk kartu barang.
 - Adanya selisih nilai aset tetap menurut Laporan BMN dengan Neraca per 31 Desember 2007.

Penelitian masalah penerapan SAP pada persediaan dan aset tetap di satuan kerja pemerintah pusat secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya, sedangkan penelitian penerapan SAP pada satuan kerja pemerintah daerah dan penelitian yang berhubungan dengan praktek akuntansi aset tetap umumnya sudah pernah dilakukan yaitu mengenai inventarisasi aset daerah atau pengelolaan aset daerah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang relevan untuk dijadikan bahan referensi bagi penelitian ini, yaitu membahas masalah penatausahaan dan akuntansi barang milik negara

berupa persediaan dan aset tetap, serta penerapan standar akuntansi pemerintahan.

Sedangkan perbedaannya adalah :

1. Obyek dalam penelitian sebelumnya seluruhnya dilakukan pada instansi pemerintah daerah, sedangkan obyek penelitian ini adalah pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang merupakan unit satuan kerja pemerintah pusat.
2. Sistem akuntansi barang untuk pemerintah daerah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah yang bersangkutan, sedangkan sistem akuntansi barang yang diterapkan di pemerintah pusat menggunakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Penelitian penerapan SAP oleh Sri Jayani (2007) menguji dengan menggunakan tujuh variabel berdasarkan karakteristik pelaksanaan *good governance* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian ini menguji bagaimana pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian persediaan dan aset tetap dalam laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN dapat disusun dan disajikan, walaupun demikian penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dalam latarbelakang penelitian, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 Tahun 2005) yang merupakan pedoman perlakuan akuntansi pemerintah yang meliputi : pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian persediaan dan aset tetap dalam laporan keuangan pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya?
2. Bagaimana Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang menyelenggarakan akuntansi BMN dapat menyajikan informasi untuk menyusun laporan keuangan yang diselenggarakan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) sesuai SAP?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis penerapan SAP (PP 24 Tahun 2005) pada persediaan dan aset tetap di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

- 2) Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis penerapan Sistem Akuntansi Instansi yang terdiri dari SAK dan SABMN dapat menyajikan informasi sesuai SAP.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Instansi yang diteliti

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi persediaan dan aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan SAI dan SAP (PP 24 tahun 2005).

- 2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi, terkait dengan penerapan SAP atas akuntansi persediaan dan aset tetap pada instansi pemerintah pusat.

- 3) Bagi Penelitian Selanjutnya

- (1) Dapat digunakan sebagai studi komparatif antara ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dengan penerapannya.
- (2) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan SAP terhadap akuntansi persediaan dan aset tetap di instansi pemerintah pusat, serta mendalami teori-teori yang ada untuk diterapkan dalam praktek.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam penelitian ini dapat terarah dan dapat mencapai sasaran maka bahasan dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada batasan masalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini hanya berlaku pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sebagai satuan kerja pemerintah pusat berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.
- 2) Penelitian ini meneliti tentang penerapan SAP atas akuntansi persediaan dan aset tetap pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

1.5. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah Pendahuluan, berisi tentang pokok-pokok masalah yang akan diteliti meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Telaah Pustaka, berisi tentang riviui penelitian terdahulu dan telaah pustaka yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisa masalah dalam penerapan SAP.

Bab III mengenai Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, narasumber, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan data.

Bab IV mengenai Analisis dan Pembahasan. Bab ini membahas hasil penelitian mengenai penerapan SAP pada akuntansi pesediaan dan aset tetap.

Bab V mengenai kesimpulan hasil penelitian atas penerapan SAP terhadap akuntansi pesediaan dan aset tetap studi kasus pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

